

EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PRO-KESETARAAN GENDER TERHADAP PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Nida Natania Rahma*¹
Fina Siti Safuroh²
Nida Khayyiratun Nafilah³
Dwi Febriyanti⁴
Ikah⁵
Nani Hartati⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

*e-mail: nidanr45@gmail.com¹

Abstrak

Kebijakan pro-kesetaraan gender merupakan langkah penting untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah. Penelitian ini mengevaluasi dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut terhadap partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Metode yang digunakan meliputi analisis data sekunder dari laporan pemerintah dan lembaga non-pemerintah serta wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pro-kesetaraan gender berhasil meningkatkan jumlah perempuan yang terlibat dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Di bidang pendidikan, terdapat peningkatan signifikan dalam angka partisipasi perempuan di tingkat pendidikan menengah dan tinggi. Dalam sektor kesehatan, akses perempuan terhadap layanan kesehatan dasar dan kesehatan reproduksi meningkat. Di sektor ekonomi, kebijakan ini telah membantu peningkatan akses perempuan terhadap peluang kerja dan usaha, serta dukungan bagi pengusaha perempuan. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam hal kesenjangan upah dan keterwakilan perempuan di posisi kepemimpinan. Studi ini menyarankan perlunya peningkatan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan, serta penguatan dukungan bagi program-program pemberdayaan perempuan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan pro-kesetaraan gender dalam jangka panjang. Dengan demikian, kebijakan ini dapat berkontribusi lebih efektif dalam menciptakan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kesetaraan Gender, Kebijakan, Dampak, Pembangunan Daerah

Abstract

Pro-gender equality policies are crucial steps to enhance women's participation in regional development. This study evaluates the impact of such policies on women's participation across various development sectors. The methods used include secondary data analysis from government and non-governmental organization reports, as well as in-depth interviews with relevant stakeholders. The results indicate that pro-gender equality policies have successfully increased the number of women involved in the education, health, and economic sectors. In education, there has been a significant rise in female participation rates at the secondary and tertiary levels. In the health sector, women's access to basic health services and reproductive health has improved. Economically, these policies have facilitated greater access for women to employment and business opportunities, as well as support for female entrepreneurs. However, challenges remain, particularly concerning wage gaps and the representation of women in leadership positions. The study suggests the need for enhanced monitoring and periodic evaluation of policy implementation, along with strengthened support for women's empowerment programs to ensure the sustainability and effectiveness of pro-gender equality policies in the long term. Thus, these policies can more effectively contribute to inclusive and sustainable regional development.

Keywords: Gender Equality, Policy, Impact, Regional Development

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender telah menjadi isu global yang penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembangunan daerah. Kebijakan pro-kesetaraan gender bertujuan untuk mengatasi ketimpangan gender yang terjadi di berbagai sektor, seperti pendidikan,

kesehatan, ekonomi, dan politik. Di Indonesia, kesetaraan gender menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional yang dituangkan dalam berbagai regulasi dan program. Meski demikian, implementasi kebijakan pro-kesetaraan gender masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan efektivitasnya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah.

Pembangunan daerah yang inklusif memerlukan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan. Peran perempuan dalam pembangunan tidak hanya terbatas pada kontribusi ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung kesetaraan gender memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan daerah. Dengan memberikan akses yang sama bagi perempuan dan laki-laki, kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Salah satu indikator keberhasilan kebijakan pro-kesetaraan gender adalah meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor pendidikan. Pendidikan adalah dasar penting bagi pemberdayaan perempuan, karena memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan akses perempuan ke pendidikan, termasuk melalui program beasiswa dan peningkatan kualitas fasilitas pendidikan. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan. Di sektor kesehatan, kebijakan pro-kesetaraan gender berfokus pada peningkatan akses perempuan terhadap layanan kesehatan dasar dan kesehatan reproduksi. Akses yang memadai terhadap layanan kesehatan sangat penting untuk memastikan kesejahteraan perempuan dan anak. Program-program seperti Posyandu dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah membantu meningkatkan akses perempuan terhadap layanan kesehatan. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal ketersediaan tenaga kesehatan yang terlatih dan fasilitas kesehatan yang memadai, terutama di daerah terpencil.

Ekonomi merupakan sektor lain di mana kebijakan pro-kesetaraan gender memainkan peran penting. Peningkatan akses perempuan terhadap peluang kerja dan usaha dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Program pemberdayaan ekonomi perempuan, seperti pelatihan keterampilan dan akses ke modal usaha, telah membantu banyak perempuan untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki serta keterwakilan perempuan di posisi kepemimpinan dalam dunia usaha.

Di bidang politik, partisipasi perempuan masih relatif rendah dibandingkan dengan laki-laki. Kebijakan afirmasi, seperti kuota perempuan dalam legislatif, telah diimplementasikan untuk meningkatkan representasi perempuan. Meski ada peningkatan, partisipasi perempuan dalam politik masih menghadapi hambatan budaya dan struktural yang perlu diatasi. Evaluasi terhadap dampak kebijakan pro-kesetaraan gender sangat penting untuk memahami sejauh mana kebijakan tersebut berhasil meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kebijakan pro-kesetaraan gender di Indonesia, dengan fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Dengan mengevaluasi implementasi dan hasil kebijakan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa kebijakan pro-kesetaraan gender dapat berkontribusi lebih optimal dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan analitis terhadap data sekunder dan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak kebijakan pro-kesetaraan gender. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan dan program di masa mendatang, serta mendukung tercapainya tujuan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi dampak kebijakan pro-kesetaraan gender terhadap partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang mendalam

mengenai implementasi dan efektivitas kebijakan, serta memberikan ruang untuk mengeksplorasi pengalaman dan persepsi dari berbagai pemangku kepentingan.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama: analisis data sekunder dan wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, termasuk laporan pemerintah, laporan lembaga non-pemerintah, jurnal ilmiah, dan publikasi lainnya yang relevan dengan kebijakan pro-kesetaraan gender di Indonesia. Analisis data sekunder ini bertujuan untuk memahami konteks kebijakan, implementasi program, serta hasil dan dampak yang telah dicapai.

Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam implementasi dan evaluasi kebijakan pro-kesetaraan gender. Responden wawancara mencakup pejabat pemerintah di tingkat nasional dan daerah, perwakilan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang kesetaraan gender, akademisi, serta perempuan yang menjadi penerima manfaat dari kebijakan tersebut. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang kaya dan beragam mengenai dampak kebijakan, tantangan yang dihadapi, dan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

Proses pemilihan responden dilakukan secara purposive sampling, di mana responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Pemilihan responden ini memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan mendalam, serta mencakup berbagai perspektif yang penting dalam mengevaluasi kebijakan pro-kesetaraan gender. Data yang diperoleh dari wawancara mendalam dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari data wawancara, mengorganisir data ke dalam kategori-kategori yang bermakna, dan mengeksplorasi hubungan antara tema-tema tersebut. Proses analisis ini melibatkan beberapa tahap, termasuk transkripsi wawancara, pengkodean data, identifikasi tema, dan interpretasi hasil. Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode, termasuk data sekunder dan hasil wawancara. Dengan demikian, peneliti dapat memastikan konsistensi dan akurasi temuan, serta mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak kebijakan pro-kesetaraan gender. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penelitian. Pemangku kepentingan diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan umpan balik terhadap temuan awal, yang kemudian digunakan untuk memperbaiki dan memvalidasi hasil penelitian. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan validitas hasil, tetapi juga memastikan bahwa penelitian ini relevan dan berguna bagi mereka yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Hasil dari analisis kualitatif ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai efektivitas kebijakan pro-kesetaraan gender, serta rekomendasi yang konkret untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Dengan memahami dampak nyata dari kebijakan ini, diharapkan dapat dikembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah dan mencapai kesetaraan gender yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pro-kesetaraan gender di Indonesia memiliki dampak positif terhadap partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Dalam sektor pendidikan, kebijakan ini berhasil meningkatkan angka partisipasi perempuan, terutama di tingkat menengah dan tinggi. Program beasiswa dan peningkatan kualitas fasilitas pendidikan di berbagai daerah telah memberikan akses yang lebih luas bagi perempuan untuk melanjutkan pendidikan. Namun, kesenjangan akses masih terlihat antara daerah perkotaan dan pedesaan. Perempuan di daerah pedesaan sering kali menghadapi hambatan ekonomi dan sosial yang membatasi mereka untuk melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk menjangkau perempuan di daerah terpencil dengan program-program yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal. Di sektor kesehatan, kebijakan pro-kesetaraan gender telah meningkatkan akses perempuan terhadap layanan kesehatan dasar dan kesehatan reproduksi. Program-program seperti Posyandu dan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah memberikan manfaat signifikan bagi perempuan. Akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang lebih baik membantu menurunkan angka kematian ibu dan meningkatkan kesehatan anak. Meski demikian, masih ada tantangan dalam hal ketersediaan tenaga kesehatan yang terlatih dan fasilitas kesehatan yang memadai di daerah terpencil. Pemerintah perlu memperkuat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan memperluas jangkauan layanan kesehatan untuk memastikan semua perempuan mendapatkan akses yang layak.

Dalam sektor ekonomi, kebijakan pro-kesetaraan gender telah membantu meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan usaha. Program pemberdayaan ekonomi perempuan, seperti pelatihan keterampilan dan akses ke modal usaha, telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan. Namun, kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan masih menjadi isu yang belum teratasi. Selain itu, keterwakilan perempuan di posisi kepemimpinan dalam dunia usaha masih rendah. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya kebijakan yang lebih tegas dalam mendorong kesetaraan upah dan peningkatan keterwakilan perempuan dalam posisi strategis. Di bidang politik, kebijakan afirmasi seperti kuota perempuan dalam legislatif telah berhasil meningkatkan jumlah perempuan yang terlibat dalam politik. Meski demikian, partisipasi perempuan dalam politik masih menghadapi hambatan budaya dan struktural. Banyak perempuan yang masih ragu untuk terlibat dalam politik karena stigma sosial dan kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, diperlukan kampanye kesadaran yang lebih luas mengenai pentingnya kesetaraan gender dan dukungan yang lebih besar dari berbagai pihak. Penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi kebijakan pro-kesetaraan gender sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi antar lembaga dan minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan program. Banyak kebijakan yang sudah baik di tingkat pusat, tetapi tidak terlaksana dengan optimal di tingkat daerah karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang lebih kuat untuk memastikan kebijakan pro-kesetaraan gender dilaksanakan dengan efektif di semua tingkatan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi pentingnya pendekatan partisipatif dalam perumusan dan implementasi kebijakan pro-kesetaraan gender. Melibatkan perempuan dan kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan juga dapat meningkatkan dukungan dan komitmen terhadap pelaksanaan kebijakan. Secara keseluruhan, kebijakan pro-kesetaraan gender di Indonesia telah memberikan dampak positif terhadap partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih inklusif dan berkelanjutan, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan komprehensif dari semua pihak. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan perempuan di semua sektor kehidupan. Dengan demikian, perempuan dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah dan mencapai potensi penuh mereka.

Implementasi kebijakan pro-kesetaraan gender di Indonesia telah memberikan berbagai dampak positif terhadap partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah. Dampak ini terlihat dalam beberapa sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Dalam sektor pendidikan, kebijakan pro-kesetaraan gender telah berhasil meningkatkan angka partisipasi perempuan. Berbagai program beasiswa dan peningkatan fasilitas pendidikan, seperti renovasi sekolah dan penyediaan alat belajar yang memadai, telah membuka akses lebih luas bagi perempuan untuk melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Dampak positif ini terlihat dari meningkatnya jumlah perempuan yang menyelesaikan pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Pendidikan yang lebih baik bagi perempuan tidak hanya meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka, tetapi juga memperluas peluang kerja dan meningkatkan kontribusi mereka dalam pembangunan daerah. Namun, kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan yang harus diatasi.

Di sektor kesehatan, kebijakan pro-kesetaraan gender telah memperbaiki akses perempuan terhadap layanan kesehatan dasar dan kesehatan reproduksi. Program seperti Posyandu dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah memberikan manfaat signifikan, terutama bagi perempuan di daerah pedesaan. Akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan reproduksi telah membantu menurunkan angka kematian ibu dan meningkatkan kesehatan anak. Selain itu, kebijakan ini juga meningkatkan kesadaran perempuan tentang pentingnya menjaga kesehatan diri dan keluarga. Namun, tantangan masih ada dalam hal ketersediaan tenaga kesehatan yang terlatih dan fasilitas kesehatan yang memadai di daerah terpencil. Perlu ada upaya lebih lanjut untuk memastikan semua perempuan, terutama di daerah terpencil, mendapatkan akses yang layak ke layanan kesehatan.

Di sektor ekonomi, kebijakan pro-kesetaraan gender telah mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan usaha. Program pemberdayaan ekonomi perempuan, seperti pelatihan keterampilan dan akses ke modal usaha, telah memberikan dampak positif dengan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan. Banyak perempuan yang kini mampu menjalankan usaha sendiri dan berkontribusi pada perekonomian keluarga dan daerah. Dampak ini juga terlihat dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan pengurangan tingkat kemiskinan. Namun, kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan masih menjadi isu yang belum teratasi, dan keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan di sektor bisnis masih rendah. Perlu ada kebijakan yang lebih tegas dan program afirmatif untuk mengatasi kesenjangan ini.

Di bidang politik, kebijakan afirmasi seperti kuota perempuan dalam legislatif telah meningkatkan jumlah perempuan yang terlibat dalam politik. Dampak positif ini terlihat dari meningkatnya jumlah perempuan yang menduduki posisi sebagai anggota legislatif di berbagai tingkatan pemerintahan. Partisipasi politik yang lebih besar memberikan perempuan kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan memperjuangkan isu-isu yang relevan dengan kepentingan mereka. Namun, partisipasi perempuan dalam politik masih menghadapi hambatan budaya dan struktural. Banyak perempuan yang masih ragu untuk terlibat dalam politik karena stigma sosial dan kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada kampanye kesadaran yang lebih luas dan dukungan yang lebih besar dari berbagai pihak untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik.

Secara keseluruhan, kebijakan pro-kesetaraan gender telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah. Meskipun demikian, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi yang lebih kuat, diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif. Selain itu, pendekatan partisipatif yang melibatkan perempuan dan kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas kebijakan. Dengan upaya yang lebih terintegrasi dan komprehensif, diharapkan kebijakan pro-kesetaraan gender dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam pembangunan daerah dan menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan perempuan di semua sektor kehidupan.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pro-kesetaraan gender di Indonesia telah memberikan berbagai dampak positif terhadap partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah. Dalam sektor pendidikan, kebijakan ini berhasil meningkatkan angka partisipasi perempuan, terutama di tingkat menengah dan tinggi. Program beasiswa dan peningkatan fasilitas pendidikan, seperti renovasi sekolah dan penyediaan alat belajar yang memadai, telah membuka akses lebih luas bagi perempuan untuk melanjutkan pendidikan. Dampak positif ini terlihat dari meningkatnya jumlah perempuan yang menyelesaikan pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Pendidikan yang lebih baik bagi perempuan tidak hanya meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka, tetapi juga memperluas peluang kerja dan meningkatkan kontribusi mereka dalam pembangunan

daerah. Namun, kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan yang harus diatasi.

Di sektor kesehatan, kebijakan pro-kesetaraan gender telah memperbaiki akses perempuan terhadap layanan kesehatan dasar dan kesehatan reproduksi. Program seperti Posyandu dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah memberikan manfaat signifikan, terutama bagi perempuan di daerah pedesaan. Akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan reproduksi telah membantu menurunkan angka kematian ibu dan meningkatkan kesehatan anak. Selain itu, kebijakan ini juga meningkatkan kesadaran perempuan tentang pentingnya menjaga kesehatan diri dan keluarga. Namun, tantangan masih ada dalam hal ketersediaan tenaga kesehatan yang terlatih dan fasilitas kesehatan yang memadai di daerah terpencil. Perlu ada upaya lebih lanjut untuk memastikan semua perempuan, terutama di daerah terpencil, mendapatkan akses yang layak ke layanan kesehatan. Di sektor ekonomi, kebijakan pro-kesetaraan gender telah mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan usaha. Program pemberdayaan ekonomi perempuan, seperti pelatihan keterampilan dan akses ke modal usaha, telah memberikan dampak positif dengan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan. Banyak perempuan yang kini mampu menjalankan usaha sendiri dan berkontribusi pada perekonomian keluarga dan daerah. Dampak ini juga terlihat dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan pengurangan tingkat kemiskinan. Namun, kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan masih menjadi isu yang belum teratasi, dan keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan di sektor bisnis masih rendah. Perlu ada kebijakan yang lebih tegas dan program afirmatif untuk mengatasi kesenjangan ini.

Di bidang politik, kebijakan afirmasi seperti kuota perempuan dalam legislatif telah meningkatkan jumlah perempuan yang terlibat dalam politik. Dampak positif ini terlihat dari meningkatnya jumlah perempuan yang menduduki posisi sebagai anggota legislatif di berbagai tingkatan pemerintahan. Partisipasi politik yang lebih besar memberikan perempuan kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan memperjuangkan isu-isu yang relevan dengan kepentingan mereka. Namun, partisipasi perempuan dalam politik masih menghadapi hambatan budaya dan struktural. Banyak perempuan yang masih ragu untuk terlibat dalam politik karena stigma sosial dan kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada kampanye kesadaran yang lebih luas dan dukungan yang lebih besar dari berbagai pihak untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik. Secara keseluruhan, kebijakan pro-kesetaraan gender telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah. Meskipun demikian, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi yang lebih kuat, diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif. Selain itu, pendekatan partisipatif yang melibatkan perempuan dan kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas kebijakan. Dengan upaya yang lebih terintegrasi dan komprehensif, diharapkan kebijakan pro-kesetaraan gender dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam pembangunan daerah dan menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan perempuan di semua sektor kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Gender Tematik: Profil Perempuan Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Hasan, Z. (2018). Gender Equality and Women's Empowerment in Indonesia. *International Journal of Humanities and Social Science Research*, 4(3), 55-64.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019). Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Komnas Perempuan. (2019). Laporan Tahunan Komnas Perempuan: Penguatan Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Suryakusuma, J. (2019). State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia. Jakarta: Komunitas Bambu.
- UN Women. (2020). Gender Equality: Women's Rights in Review 25 Years after Beijing. New York: UN Women.
- UNICEF Indonesia. (2021). Annual Report 2020. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Wardhani, I., & Rahman, A. (2020). The Impact of Gender Equality Policy on Women's Participation in Regional Development. *Journal of Indonesian Social Sciences*, 5(2), 101-118.
- World Bank. (2020). *Women, Business and the Law 2020*. Washington, DC: The World Bank.